

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nigeria sebagai salah satu negara di kawasan Afrika Barat dengan perkembangan ekonomi yang pesat pada saat ini. Memiliki GDP sebesar US\$ 1,1 Triliun pada tahun 2015, membawa Nigeria sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat mengalahkan Afrika Selatan yang memiliki GDP sebesar US\$ 725,9 Milyar pada tahun yang sama. Dengan jumlah penduduk sebanyak 186.053.836 penduduk pada tahun 2016, membawa Nigeria sebagai negara terpadat penduduknya di Afrika.¹ Saat ini, Nigeria merupakan salah satu negara di kawasan Afrika yang diperhatikan sebagai kawasan strategis untuk melakukan investasi dan perdagangan internasional oleh pemerintah Indonesia.

Pertama kalinya kedua negara telah melakukan kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi dan teknik pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid tepatnya pada 21 Desember 2000 di Jakarta. Dipimpin langsung oleh menteri luar negeri Nigeria pada saat itu yaitu YM. Al Haji Sule Lamiza, kedua negara sepakat untuk meningkatkan interaksi ekonominya. Meski dalam pelaksanaannya, tidak terdapat kejelasan mengenai perkembangannya akibat

¹ Central Intelligence Agency, *The World Fact Book* diakses dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html> (6/11/2016, 23.35 WIB)

Nigeria yang belum melakukan ratifikasi. Sedangkan Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi sejak 22 Februari 2001.²

Selanjutnya pada tahun 2001, presiden Indonesia Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan ke Nigeria. Kunjungan tersebut sebagai bentuk usaha peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Nigeria yang sekaligus menjadi lawatannya pada KTT D8 di Qatar. Nigeria yang sejak 1974 yang menjadi produsen minyak terbesar ke 6 di dunia, serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap pasar Amerika Serikat dalam sektor migas dengan menjadi produsen minyak bumi kedua setelah Arab Saudi, dianggap dapat memberikan keuntungan terhadap perekonomian Indonesia. Posisi Nigeria yang penting bagi industri di Amerika Serikat serta perjanjian kerja sama perdagangan bebas yang telah ditandatangani oleh kedua negara, diharapkan dapat menjadi jembatan bagi Indonesia untuk membantu memperbesar transaksi ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat.³ Dalam pertemuan ini dibahas juga mengenai rencana pembelian pesawat CN235 yang dibuat oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan Spanyol oleh Nigeria, meskipun pada akhirnya tidak ada kejelasan dalam hal pembelian pesawat tersebut.

Presiden Nigeria Olosegun Obasanjo yang memimpin Nigeria sejak 1999 hingga 2007 telah dua kali melakukan kunjungan ke Indonesia. Yaitu pada pelaksanaan KTT Asia Afrika pada 22-24 April 2005 di Bandung serta KTT D8

² Kementerian Luar Negeri, *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Republik Nigeria mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik*, diakses dalam http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/797_NGA-2000-0001%20.pdf (05/01/2017, 21.33 WIB)

³ Toyin Falola dan Matthew M. Heaton, 2008, *The History of Nigeria*, New York: Cambridge University Press, hal.260, diakses dalam <http://en.booksee.org/book/1165614>. (11/04/2016, 20.11 WIB).

di Bali pada 15 Mei 2006. Kemudian masih di Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada 26 September 2006 disela-sela kunjungannya dipertemuan PBB di New York, pertemuan bilateral dilakukan dengan Presiden Nigeria pada saat itu yaitu Umaru Musa Yar'adua.⁴ Pertemuan ini membahas mengenai komitmen penguatan interaksi ekonomi kedua negara melalui perdagangan dan investasi. Komitmen ini kemudian menghasilkan pembukaan *Export and Promotion Agency* Indonesia di Lagos pada 26-30 September 2007, di bawah Kementerian Perdagangan yang dikenal dengan *Indonesian Trade Promotion Centre Lagos* atau ITPC Lagos.⁵ ITPC ini bertugas sebagai agen promosi produk Indonesia serta penyedia informasi pasar Nigeria bagi pengusaha Indonesia begitu pula sebaliknya.

Momentum pelemahan ekonomi dunia pada 2008 yang berdampak pada menurunnya nilai ekspor produk-produk non migas Indonesia pada lima negara negara tradisional yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, India dan Singapura menjadikan pemerintah mencari negara baru tujuan ekspor yang dikenal dengan pasar non-tradisional. Hal ini kemudian yang menyebabkan pemerintah terus meningkatkan interaksinya dengan Nigeria sebagai pasar terbesar di Afrika. Pada 25 September 2010 kemudian untuk kedua kalinya, presiden kedua negara bertemu di New York pada sela-sela pertemuan PBB mengenai MDGs dengan menyepakati *Memorandum of Understanding on*

⁴ Kementerian Luar Negeri, *Current Development of the Relations Between Indonesia and Nigeria*, diakses dalam <http://www.kemlu.go.id/abuja/id/arsip/siaran-pers/Pages/Current-Development-of-the-Relations-Between-Indonesia-and-Nigeria.aspx> (11/12/2016, 03.00 WIB).

⁵ ITPC, *Short for Indonesian Trade Promotion Centre is a Non Profit Government Organization under the Supervision of the Directorate General for National Export Development* diakses dalam <http://www.itpclgs.com/about-us/> (6/11/2016, 23.35 WIB)

Bilateral Joint Commission. Isi MoU ini merupakan pembentukan tim Komisi Bersama yang berisi para ahli kedua negara untuk membahas dan merumuskan mengenai poin-poin penguatan kerjasama. Poin kerjasama yang disetujui untuk dikembangkan selanjutnya meliputi lima bidang yaitu bidang ekonomi, investasi, perdagangan, budaya dan kerjasama teknik. Pembentukan tim Komisi Bersama bertujuan untuk meningkatkan interaksi kerjasama bilateral kedua negara.⁶

Pada 2-3 Februari 2013, terjadi Misi Dagang Indonesia ke Nigeria yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Kementerian Luar Negeri beserta Duta Besar RI untuk Nigeria, Menteri Perdagangan, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ketua KADIN Komite Afrika, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, CEO PT GMF AeroAsia, PT. Wilmar Group, PT. Aneka Coffe Industry, PT. Musimas, PT. Garuda Indonesia, PT. Dexa Medica, Kalbe International, dan PT. Indorama. Beberapa utusan Indonesia ini kemudian bertemu langsung Presiden Nigeria Goodluck Jonathan beserta kementerian terkait Nigeria, President NACCIMA, Presiden SMEDAN, President Manufactures Association of Nigeria, Direktur Sterling Bank, Executive Direktor of Guaranty Trust Bank, Chaiman of Nigerian Indonesia Commercial Association, Chief Editor African Leadership Magazine, CEO Max Air Limited, Orange Drugs, Hak Air, Hampton Apartment and Residential,

⁶ Kementerian Luar Negeri, *Current Development of the Relations Between Indonesia and Nigeria*, diakses dalam <http://www.kemlu.go.id/abuja/en/arsip/siaran-pers/Pages/Current-Development-of-the-Relations-Between-Indonesia-and-Nigeria.aspx> . (05/01/2017, 04.15 WIB)

Kabo Air, Silverback Africa, Service Air Ltd serta 300 kelompok pengusaha Nigeria lainnya.⁷ Misi dagang ini dilakukan untuk menegaskan kembali hubungan ekonomi kedua negara yang telah terjalin lama, sekaligus menghasilkan penandatanganan *Joint Communique 2 February 2013* serta empat buah *Memorandum of Understanding (MoU)* yaitu *MoU between The Directorate General of Small and Medium Industry of The Ministry of Industry of The Republic of Indonesia and The Small and Medium Enterprises Development Agency of The Federal Republic of Nigeria on Cooperation in The Field of Economic Capacity Enhancement of Small and Medium Enterprises in the Industrial Sector*, *MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Federal Republic of Nigeria on The Cooperation in Combating Illicit Production, Manufacture and Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Its Precursors*.⁸ MoU antara Kamar Dagang Indonesia dengan *Nigeria Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture*, MoU antara PT GMF AeroAsia dengan maskapai Nigeria Kabo Air, Silverback Africa, Hak Air, Max Air Ltd dan Service Air Ltd.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komunike diserap dari bahasa Inggris *communique* berarti adalah pengumuman resmi dari pemerintah

⁷ Kementerian Perdagangan, *Op. Cit.*, hal 44-45.

⁸ Kementerian Luar Negeri, *Basis Data Perjanjian Internasional*, diakses dalam http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=97 (27/08/2017, 20.30 WIB).

⁹ Kementerian Perdagangan, *Report on Export Development 2013*, diakses dalam https://www.google.co.id/search?q=nica&oq=nica&aqs=chrome..69i57j0l5.1376j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=report+on+export+development+2013+kemendag. (14/06/2015, 14.00 WIB).

yang dikeluarkan sesudah selesai pertemuan diplomatik atau sesudah kegiatan militer tertentu.¹⁰ Sehingga *Joint Communique* atau komunike bersama adalah poin-poin komitmen hasil dari pertemuan diplomatik yang telah dilakukan oleh pejabat dua negara atau lebih. *Joint Communique* ini bersifat mengikat meskipun tidak ada proses penandatanganan seperti MoU karena isinya merupakan komitmen kedua pejabat tinggi yang dalam hal ini adalah Presiden kedua negara. Sehingga *Joint Communique* ini menjadi rujukan bagi kerjasama kedua negara kedepannya.¹¹ Namun, dalam *Joint Communique 2 February 2013* disebutkan bahwa kedua negara harus bekerja bersama mengani beberapa MoU yang telah ditandatangani sebelumnya.

Joint Communique Between The Federal Republik of Nigeria and The Republic of Indonesia 2 February 2013 yang dihasilkan terdiri dari 4 poin kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi. Yaitu;

1. Presiden kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara serta bersama-sama melakukan perdagangan yang seimbang dan menguntungkan.
2. Presiden kedua negara sepakat untuk mendukung peningkatan interaksi antar Kamar Dagang kedua negara. Dua pemimpin negara juga menginstruksikan lembaga terkait untuk bekerja bersama-sama terhadap finalisasi beberapa kerjasama dan MoU yang telah disepakati, yaitu;

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dalam <https://kbbi.web.id/komunike>, (20/09/2017, 02.34)

¹¹ Hasil wawancara peneliti dengan Yuvi Shandy Amisadai, Staf Direktorat Afrika, Kementerian Luar Negeri vi Telephone pada Jumat, 10 Maret 2017.

- a. MoU antara Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian dengan *The Small and Medium Enterprises Development Agency of The Federal Republic of Nigeria*.
 - b. MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan kedua negara.
 - c. *Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of Investment between Indonesia and Nigeria*.
 - d. MoU antara Kamar Dagang Indonesia dengan *Nigeria Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture*.
3. Kedua negara sepakat untuk berbagi praktek serta pembangunan kapasitas untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs).
 4. Presiden kedua negara sepakat untuk mendorong kerjasama dalam bidang agrikultur terutama pada pertanian kakao, kelapa sawit, perkebunan karet, serta kacang-kacangan didaerah Nigeria bagian utara.¹²

Dengan mempertimbangkan hasil-hasil poin kerjasama ekonomi dalam *Joint Communique 2 February 2013* tersebut yang berisi tentang kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara. Penelitian ini kemudian akan menganalisis latar belakang kepentingan Indonesia dan Nigeria dalam pembentukan kerjasama tahun 2013 yang tertuang dalam *Joint Communique*

¹² Kementerian Luar Negeri, *Joint Communique between The Federal Republik of Nigeria and The Republic of Indonesia*, diakses dalam http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/3407_NGA-2013-0004.pdf. (6/09/2016, 23.00 WIB). Draft *Joint Communique* terdapat dalam halaman lampiran.

*Between The Federal Republik of Nigeria and The Republic of Indonesia 2
February 2013.*

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka *research question* yang tepat dalam penelitian ini adalah ***Mengapa Indonesia dan Nigeria membentuk Kerjasama bidang ekonomi ditahun 2013?***

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah menganalisis latar belakang kepentingan Indonesia dan Nigeria dalam membentuk Kerjasama bidang Ekonomi tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi acuan bagi penulis lainnya mengenai perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi antara Indonesia dengan Nigeria, dimana masih terbatasnya para peneliti yang membahas mengenai hubungan ekonomi kedua negara. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya penelitian di bidang Ilmu Hubungan Internasional kaitannya dengan peningkatan hubungan kerjasama ekonomi antar negara khususnya kerjasama ekonomi Indonesia dengan Nigeria.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerjasama ekonomi terutama dalam kerjasama bilateral antar negara. Dapat juga memberikan referensi mengenai kepentingan serta landasan negara dalam melakukan kerjasama.

1.5 Penelitian Terdahulu

Referensi yang masih terbatas mengenai perkembangan ekonomi Indonesia di Afrika terutama di Nigeria menjadi acuan bagi penulis untuk menulis skripsi mengenai negara terbesar di Afrika Barat ini. Terdapat potensi yang sebenarnya dapat ditemukan sehingga akan menjadi acuan bagi penulis sejenis di masa mendatang. Penelitian terdahulu mengenai kerjasama ekonomi negara-negara selain Nigeria digunakan oleh penulis sebagai acuan untuk melihat kerangka berfikir mereka dalam menganalisa hubungan ekonomi luar negeri negara Indonesia serta negara lain, dengan negara-negara di Benua Afrika.

Penelitian skripsi pertama ditulis oleh Putri Nooratih Nurastutiha pada tahun 2011, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Pengaruh Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Paraguay terhadap Perekonomian Indonesia pada Sektor Ekspor dan Impor. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis meski negara yang diteliti berbeda. Dalam skripsi di jelaskan bahwa perdagangan ekspor dan impor kedua negara semakin menunjukkan laju pertumbuhan yang positif dan menguntungkan satu sama lain. Pada awalnya kerjasama kedua negara hanya

sebatas kerjasama multilateral yang tergabung dalam FEALAC (*Forum for East Asia LATIN America Cooperation*) dan belum sama sekali terdapat kerjasama bilateral. Hal ini mendorong kedua negara untuk meningkatkan intensitas perdagangannya dengan langkah awal yaitu pembentukan kedutaan besar kedua negara yang sebelumnya di rangkap pada kedutaan besar Paraguay di Korea Selatan dan KBRI di Buenos Aires.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis dimana meskipun sebelumnya belum terdapat kerjasama ekonomi langsung kedua negara namun telah terjadi perdagangan antar kedua negara. Akibat nya kedua negara menyadari bahwa perlu adanya penguatan kerjasama agar intensitas perdagangan tersebut semakin meningkat. Perbedaannya adalah negara yang diteliti oleh peneliti terdahulu adalah Tiongkok sedangkan penulis memilih Nigeria.

Penelitian kedua dilakukan oleh mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Abdul Aziz pada tahun 2012 dengan judul penelitian “Kepentingan Politik, Ekonomi Indonesia dalam Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Strategis dengan Tiongkok”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kebangkitan Tiongkok dalam industri militer dan ekonomi mengantarkan Indonesia untuk melakukan kerjasama kemitraan strategis dengan Tiongkok. Hal ini didukung dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang tidak berpihak pada salah satu kubu kekuatan Internasional sehingga hal ini tidak membatasi Indonesia untuk melakukan hubungan kemitraan dengan negara-negara lain. Kondisi alutsista militer Indonesia yang

memprihatinkan mengantarkan Indonesia sebagai negara yang rawan embargo sehingga membutuhkan negara seperti Tiongkok untuk melakukan transfer teknologi militer serta stabilitas keamanan kawasan. Dalam segi ekonomi, kebangkitan Tiongkok dalam perekonomiannya mengantarkan Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi di Tiongkok.

Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah, penelitian ini berusaha menggambarkan bahwa kemitraan strategis yang dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan volume perekonomian Indonesia yang menjadi kepentingan nasionalnya. Perbedaannya penulis melihat dari lingkup kerjasama yang lebih kecil yaitu penandatanganan nota kesepahaman sekaligus penulis melakukan metode penelitian deskriptif berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan eksplanatif.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Erma Hutagalung dalam penulisan skripsinya.¹³ Erma Hutagalung dalam tulisannya pada tahun 2013 dari Universitas Hasanuddin yang berjudul *Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Afrika Sub Sahara*. Menjelaskan aspek historis seperti kuatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara di Afrika akibat semangat anti kolonialisme yang dicetuskan oleh Soekarno bersama dengan pemimpin Afrika lainnya. Dalam penelitian tersebut diuraikan berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara di Afrika melibatkan berbagai pihak

¹³ Erma Hutagalung, 2013, *Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Afrika Sub Sahara*, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Diakses dalam https://www.academia.edu/8373063/Hubungan_Kerjasama_Indonesia_dengan_Afrika_Sub_Sahara (14/06/ 2015, 14.00 WIB)

swasta dengan kerjasama dalam bentuk penyediaan bahan makanan serta bahan jadi lainnya. Hubungan ekonomi ini sebagian besar menguntungkan pihak Indonesia, dimana Afrika menjadi pasar non tradisional baru untuk memasarkan produk jadi Indonesia pada pasar Afrika. Penanaman modal asing menjadi fokus konsentrasi dari tulisan ini, dimana penulis menggabungkan *Foreign Direct Investment* dan melihatnya dengan kaca mata ekonomi makro serta aspek perundangan Indonesia yaitu seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal asing. Dalam penelitian ini kesamaan kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya dapat dilihat. Namun, perbedaannya penelitian ini menjelaskan kawasan Afrika secara keseluruhan sedangkan penulis lebih berkonsentrasi terhadap hubungan satu negara yaitu Nigeria.

Penelitian ke empat dilakukan oleh Lisa Carrin Brown pada tahun 2016 dengan thesis berjudul *Soft Power Effort Hard Power Gains - India's Economic Diplomacy towards Africa using Nigeria and Kenya as Examples* dari Universitas Cape Town, Afrika Selatan. Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana perubahan yang telah India lakukan terhadap kebijakan ekonomi dalam negerinya berdampak terhadap kebijakan ekonomi luar negeri India yang menghasilkan sebuah strategi diplomasi ekonomi dengan praktek hubungan ekonomi yang dilakukan oleh India terhadap dua negara Afrika yaitu Kenya dan Nigeria.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa Diplomasi Ekonomi India hadir

¹⁴ Lisa Carrin Brown, 2016, *Soft Power Effort Hard Power Gains - India's Economic Diplomacy towards Africa using Nigeria and Kenya as Examples*, Thesis, Afrika Selatan: Program Spesialisasi Politik, Filsafat dan Ekonomi Universitas Cape Town, diakses dalam

akibat perubahan politik luar negerinya. Hal ini lah yang menjadikan dorongan bagi India untuk memperluas pasarnya.

Kenya menjadi pasar yang menjanjikan oleh India terutama untuk kawasan Afrika Timur. India memiliki tujuan untuk menjadikan Kenya sebagai pasar baru bagi produk-produk India, melihat Kenya yang masih belum mampu dalam menata struktur ekonomi nya serta sumber daya alam yang sangat rendah. India menargetkan negaranya menjadi salah satu negara terbesar yang dapat menguasai pasar Kenya termasuk volume impor barang Kenya. Hal ini didukung dengan komunitas Diaspora India yang kuat di Kenya sehingga memfasilitasi para pengusaha India untuk terus meningkatkan masuknya produk-produk India di Kenya. Kenya sebagai negara terbesar perekonomiannya di Afrika Timur dapat menjadi kunci bagi India untuk dapat menguasai perekonomian di negara-negara di Afrika Timur. Sedangkan hubungannya dengan Nigeria, India memiliki kepentingan terhadap ketersediaan minyak bumi yang melimpah di Nigeria sehingga hal ini tentu dapat mengamankan kebutuhan energi di India yang terus berkembang. India memiliki cara pendekatan ekonomi tersendiri di Nigeria dimana India menginginkan penguasaan terhadap industri minyak bumi Nigeria. Dimana salah satu perusahaan minyak India telah hadir di Nigeria.

Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah strategi yang dilakukan oleh India untuk meningkatkan kerjasama nya dengan Kenya dan Nigeria. Hal

ini didorong pula oleh kepentingan ekonomi untuk menguasai pasar kedua negara tersebut. Perbedaananya, penelitian ini menjelaskan dampak dari diplomasi ekonomi yang menghasilkan peningkatan investasi ekonomi India di Kenya dan Nigeria. Sedangkan penulis berusaha menjelaskan kepentingan nasional Indonesia dalam hal ekonomi menghasilkan strategi agar kerjasama Indonesia dan Nigeria semakin maju.

Sementara penelitian dari penulis yang berjudul Strategi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Nigeria melalui Memorandum of Understanding berusaha menjelaskan bagaimana penandatanganan MoU oleh Indonesia dengan Nigeria sebagai bentuk penguatan kerja sama ekonomi kedua negara. Penulis juga akan mengulas bahwa kerjasama ini juga didorong oleh kepentingan Indonesia untuk meningkatkan transaksi perekonomiannya terutama dengan mitra negara non tradisional yaitu Nigeria.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

| Nama/Judul/Tahun | Metodologi/Pendekatan | Hasil |
|--|---|--|
| Putri Nooratih Nurastutihar / <i>Pengaruh Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Paraguay terhadap Perekonomian Indonesia pada Sektor Ekspor dan Impor</i> / 2011 . | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Kerjasama Bilateral • Konsep Perdagangan Internasional • Teori Interdependensi | Volume ekspor impor yang semakin meningkat antara kedua negara menginisiasi Indonesia dan Paraguay untuk meningkatkan kerjasamanya. Peningkatan kerjasama yang dimaksud adalah dengan pembukaan kedutaan besar di kedua negara yang sebelumnya dirangkap dengan negara lain, guna semakin intens nya laju perdagangan kedua negara. |
| Abdul Aziz / <i>Kepentingan Politik, Ekonomi Indonesia dalam Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Strategis dengan Tiongkok</i> / 2012. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan Nasional • Model Aktor Rasional | Indonesia memiliki kepentingan nasional dalam kerjasamanya dengan Tiongkok. Dalam bidang politik Indonesia ingin menjadikan momentum kebangkitan Tiongkok sebagai stabilisasi keamanan kawasan dan dalam bidang ekonomi Indonesia bertujuan untuk mengalahkan negara-negara ASEAN lainnya dalam meningkatkan volume perdagangan dan investasi dengan Tiongkok. |
| Erma Hutagalung / <i>Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Afrika Sub Sahara</i> / 2013. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Foreign Direct Investment</i> | Aspek historis Indonesia yang menginisiasi gerakan non Blok dengan Afrika menjadi keuntungan Indonesia untuk melakukan kerjasama yang lebih serius dengan negara-negara di Afrika. Potensi perkembangan ekonomi Afrika yang besar dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai penanam modal. Sedangkan untuk Afrika, |

| | | |
|--|---|---|
| | | negara-negara tersebut memiliki kepentingan untuk membentuk wiraswata-wiraswasta baru yang nantinya akan menumpu perekonomian di Afrika |
| Lisa Carrin Brown / <i>Soft Power Effort Hard Power Gain - India's Economic Diplomacy towards Africa using Nigeria and Kenya as Examples</i> / 2016. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Diplomacy Economy</i> • <i>Soft Power</i> | India memiliki kebijakan luar negeri beraliansi pada masa sebelum perang dingin, namun berubah semenjak perang dingin dengan kebijakan non bloknya. Hal ini mendukung perubahan kebijakan ekonomi luar negerinya dengan menggunakan strategi diplomasi ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari hubungan ekonomi India dengan Kenya dan Nigeria di kawasan Afrika. |
| Nuril Khoiriyah / <i>Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Nigeria Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono</i> / 2016. | <ul style="list-style-type: none"> • Rezim Internasional • Kepentingan Nasional | Indonesia memiliki peluang untuk memperluas pemasaran produk-produk negeri Indonesia di Nigeria sehingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjawab peluang ini dengan memperkuat kerjasama kedua negara melalui penandatanganan MoU tahun 2013. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintahan SBY yang menginginkan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih besar serta memberikan kesempatan ekonomi untuk UKM Indonesia. |

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Teori Rezim Internasional

Rezim Internasional merupakan teori yang berasal dari tradisi liberal, dimana kerjasama mungkin terjadi dalam sistem anarki dunia karena rezim sendiri merupakan hasil dari kerjasama internasional. Robert Keohane mendefinisikan Rezim Internasional menjadi beberapa garis besar. Pertama yaitu rezim internasional digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan para anggotanya. Kedua yaitu rezim internasional digunakan sebagai media atau fasilitas untuk menghadapi kendala atau hambatan para anggotanya. Ketiga yaitu memberikan kepastian terhadap tindakan kolektif para anggotanya. Hal ini merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Robert Keohane dalam karyanya yaitu *The Demands for International Regimes*.

*International regimes can be interpreted in part as devices to facilitate the making of substantive agreements in world politics, particularly among states. Regimes facilitate agreements by providing rules, norms, principles and procedures that help actors to overcome barriers to agreement identified by economic theories of market failure. That is, regimes make it easier for actors to realize their interests collectively.*¹⁵

Penulis menggunakan kerangka rezim internasional untuk menjelaskan bahwa kerjasama ekonomi Indonesia dengan Nigeria tahun 2013 merupakan bagian dari rezim untuk menjamin kepentingan Indonesia dalam meningkatkan

¹⁵ Robert O. Keohane, *The Demand for International Regimes*, diakses dalam http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_materiales/materiales037.pdf hal 354. (05/08/2016, 09.55 WIB)

ekspor dan perluasan pasar begitu pula sebaliknya bagi Nigeria. Kedua yaitu *Joint Communiqué* menjadi media yang efektif guna menghadapi halangan-halangan terhadap fasilitasi pasar. Serta kerjasama ekonomi mampu menjamin kepastian tindakan kolektif Nigeria untuk menghadapi kendala-kendala perdagangan.

Hal ini merupakan strategi pemerintah agar dapat memberikan jalan mulus bagi para pengusaha Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnisnya di Nigeria, serta mengalihkan pasar ekspor yang menurun dari negara-negara tradisional. Komunike bersama ini juga berguna untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa didapatkan oleh kedua negara, baik sesuai dengan poin-poin kerjasama atau lebih dari itu. Komunike Bersama ini berisi aturan, norma, prinsip dan prosedur yang nantinya akan dipatuhi kedua negara agar tujuan peningkatan kerjasama dapat tercapai bersama. Pertukaran informasi mengenai potensi pasar di kedua negara tidak mungkin diketahui tanpa bantuan dari rezim yang terjalin lewat komunike bersama.

1.6.2. Konsep Kepentingan Nasional

Istilah kepentingan nasional banyak digunakan oleh para negarawan dan akademisi sejak ditemukannya konsep negara-bangsa untuk mendeskripsikan aspirasi dan tujuan entitas kedaulatan negara. Secara umum kepentingan nasional dapat diartikan sebagai pedoman negara dalam menentukan kebijakan luar negeri dan arah politik luar negerinya. Kepentingan nasional tidak bisa lepas dari keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan kemakmuran dalam dunia internasional. Dalam penentuan arah kebijakan nasionalnya negara dapat dipengaruhi oleh norma, lembaga, pendapat para ahli serta keadaan. Kepentingan nasional negara nantinya dapat dilihat dari doktrin yang dijalankan oleh negara serta berbagai publikasi media.

Donald E. Nuechterlin menyebutkan bahwa terdapat empat jenis kepentingan nasional suatu negara yaitu;

- i. *Defence interests : the protection of the nation-state and its citizens against the threat of physical violence and directed from other states and/or an externally inspired threat to its system of government.*
- ii. *Economic interest : the enhancement of nation state's economic well being in relation with other states.*
- iii. *World Order interest : the maintenance of an international political and economic system in which the nation state may feel secure, and in which its citizens and commerce may operate peacefully outside its borders.*
- iv. *Ideological interest : the protection and furtherance of set of values which the people of nation state share and believe to be universally good.*¹⁶

¹⁶ Donald E. Nuechterlin, 1976, *British Journal of International Studies*, Great Britain: Cambridge University Press, hal 248, diakses dalam <http://www.jstor.org/stable/20096778>. (08/12/2016, 15.55 WIB)

Secara umum, pendapat tersebut dapat diartikan sebagai berikut;

1. Kepentingan pertahanan yang berisi tentang kepentingan negara untuk melindungi warga negaranya, kawasan teritori serta sistem politik dari ancaman negara lain;
2. Kepentingan ekonomi yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negaranya melalui hubungan dengan negara lain;
3. Kepentingan tata internasional yaitu kepentingan untuk mewujudkan politik serta ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya serta menjamin keamanan kegiatan warga negara dan perdagangan lintas batas negaranya ;
4. Kepentingan ideologi yaitu kepentingan untuk melindungi dan mempertahankan ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Lebih lanjut, Miroslav Nincic menjelaskan bahwa kepentingan nasional harus mencakup tiga asumsi dasar. Pertama, kepentingan harus bersifat vital sehingga pencapaiannya harus menjadi prioritas pemerintah dengan masyarakat. Kedua, kepentingan nasional tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Ketiga yaitu kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok serta lembaga pemerintahan. Sehingga kepentingan nasional tersebut dapat menjadi kepedulian masyarakat umum yang akan bersama-sama mencapainya dengan pemerintah.¹⁷

¹⁷ Aleksius Jemadu, 2008, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 67.

Hasil-hasil poin kerjasama yang terdapat dalam *Joint Communiqué* Indonesia dengan Nigeria memiliki tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi Indonesia di Nigeria. Serta mengalihkan pasar ekspor Indonesia yang terus menurun dari negara-negara tradisional. Para pengusaha Indonesia diajak bersama-sama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut berperan aktif dalam kesepakatan ini. Dengan kata lain para pemilik usaha baik BUMN atau swasta serta para pelaku ekonomi kecil menengah diberikan fasilitas berupa MoU yang diharapkan dapat melakukan ekspansi ekonomi terhadap Nigeria. Sehingga terbuka jalur yang lebih besar bagi para pengusaha untuk melakukan ekspor dan *Outward Investment* ke Nigeria.

1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yaitu berisi tentang langkah-langkah pengumpulan data atau keterangan yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Adapun metode yang digunakan penulis dalam proses penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif, dimana penelitian ini menjelaskan serta menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Fokus dalam penelitian adalah menganalisis hubungan-hubungan antar variabel penelitian.

1.7.2 Level Analisis

Dalam menjelaskan level analisa penulis menggunakan antar negara atau level *state* dalam penelitian. Penulis menjelaskan pengaruh di tingkat domestik dan di internasional yang berupa krisis dunia tahun 2008 yang melemahkan nilai ekspor Indonesia ke negara tradisional menimbulkan keputusan negara untuk melakukan kerjasama ekonomi yang lebih mengikat dengan Nigeria.

1.7.3 Unit Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menentukan bahwa landasan kepentingan Indonesia untuk meningkatkan ekspor akibat melemahnya ekspor ke negara tradisional dan defisit neraca perdagangan terhadap Nigeria sebagai Variabel dependen atau unit eksplanasi dalam penelitian ini. Sedangkan variabel independennya adalah kebijakan Indonesia dan Nigeria terhadap kesepakatan pembuatan kerjasama tahun 2013 menjadi unit analisisnya. Penulis kemudian menggunakan penelitian dengan sifat korelasional dimana unit eksplanasi memiliki kedudukan yang sama dengan unit analisisnya.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deduktif. Penelitian ini lebih menekankan terhadap pengujian hipotesis yang dijelaskan dengan konkrit serta dengan menguraikan fakta-fakta. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang berhubungan dengan penerimaan atau penolakan hipotesis.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis untuk mencari kebutuhan informasi dalam penulisan penelitian. Dalam kasus ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Teknik wawancara terstruktur yaitu teknik wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengkategorikan tanggapan dari responden. Pewawancara disini berusaha untuk berpegang terhadap naskah atau *script*.
2. Metode *document based research* dengan mengumpulkan data dari artikel-artikel penelitian yang diterbitkan oleh institusi yang terlibat langsung dalam kerjasama maupun tidak, pakar serta ahli. Data yang didapatkan oleh penulis berasal dari dokumen primer dan sekunder atau dokumen yang diperoleh dari orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian.

1.8 Ruang Lingkup Penelitian

1.8.1.1 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian dimulai pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan proses politik dan mengeluarkan kebijakan guna keluar dari pelemahan akibat krisis dunia hingga pada tahun 2013 sebagai bentuk tercapainya kerjasama Indonesia dengan Nigeria.

1.8.1.2 Batasan Materi

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan tidak meluas, penulis memberikan batasan penelitian guna pembahasan yang dibahas dapat terarah. Adapun bahasan materi dari penelitian ini dimulai dengan kepentingan Indonesia terhadap pasar Nigeria. *Joint Communique* kemudian digunakan sebagai strategi Indonesia untuk dapat memaksimalkan keuntungan melalui peningkatan ekspor dan pencarian pasar baru, terlepas dari ketergantungan pasar ekspor lima negara tradisional.

1.9 Hipotesa

Penulis merangkum beberapa hipotesa dalam penelitian ini. Persetujuan kerjasama yang terangkum dalam *Joint Communique* antara Indonesia dengan Nigeria dipengaruhi latar belakang kepentingan politik dan ekonomi Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Beberapa kepentingannya yakni;

1. Kerjasama tahun 2013 dengan Nigeria digunakan untuk mencari negara tujuan ekspor baru berupa negara nontradisional dimana ekspor sebelumnya yang terkonsentrasi pada negara tradisional mengalami penurunan akibat krisis dunia tahun 2008.
2. Mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia akibat krisis dunia.
3. Memperluas pasar produk-produk Indonesia.

4. Mengatasi defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Nigeria akibat besarnya impor migas dari negara Afrika Barat.
5. Meningkatkan transfer ilmu dan transfer teknologi melalui investasi ke Nigeria.
6. Mendukung implementasi MP3EI atau Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang digagas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
7. Membantu mensukseskan MDGs.



1.10 Sistematika Penelitian

Tabel 1.2 Sistematika Penelitian

| Bab | Bahasan Pokok |
|--|--|
| | 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.5 Penelitian Terdahulu 1.6 Kerangka Konsep dan Teori 1.7 Metode Penelitian 1.7.1 Tipe Penelitian 1.7.2 Level Analisa 1.7.3 Unit Analisa 1.7.4 Variabel Penelitian 1.7.5 Teknik Analisa 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 1.8 Ruang Lingkup Penelitian 1.8.1.1 Batasan Waktu 1.8.1.2 Batasan Materi 1.9 Hipotesa 1.10 Sistematika Penelitian |
| Bab II : Realisasi <i>Joint Communique</i> 2 February 2013 | 2.1 Realisasi Kerjasama Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian dengan <i>The Small and Medium Enterprises Development agency of the Federal Republic of Nigeria</i> (SMEDAN) 2.2 Realisasi MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan <i>The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Federal Republic of Nigeria</i> . 2.3 <i>Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of Investment between Indonesia and Nigeria</i> |

| | |
|---|--|
| | <p>2.4 Realisasi MoU antara Kamar Dagang Indonesia dengan <i>Nigeria Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture</i></p> <p>2.5 Kerjasama Praktek dan Pembangunan Kapasitas dalam <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs)</p> <p>2.6 Hambatan-hambatan dalam realisasi <i>Joint Communique 2 February 2013</i>.</p> |
| Bab III : Kepentingan Nasional Indonesia. | <p>3.1 Peningkatan Volume Ekspor</p> <p>3.2 Pelaku Ekonomi Berpengaruh di Nigeria</p> <p>3.3 Mempertahankan Nigeria sebagai Pemasok Bahan Baku Primer</p> <p>3.4 Transfer Ilmu dan Pengalaman Industri</p> |
| Bab IV : Kepentingan Nasional Nigeria. | <p>4.1 Pasar Tujuan Ekspor Migas dan Barang Primer lainnya</p> <p>4.2 Mengurangi Dominasi Pasar Tiongkok</p> <p>4.3 Peningkatan Investasi Non Migas</p> |
| Bab V : Kesimpulan dan Saran | <p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p> |